

**KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA**

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE
AUDIT, ROA DAN DER TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PENDEKATAN *OPERATING CASH FLOW*
INDUSTRI PERBANKAN DI ASEAN**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

GITA LIONY PUTRI

2014310420

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

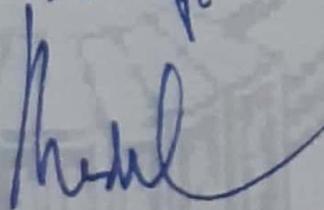
2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Gita Liony Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Juni 1995
N.I.M : 2014310420
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Kosentrasi : Akuntansi Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA dan DER terhadap *Tax Avoidance* Pendekatan *operating cash flow* Industry Perbankan di ASEAN

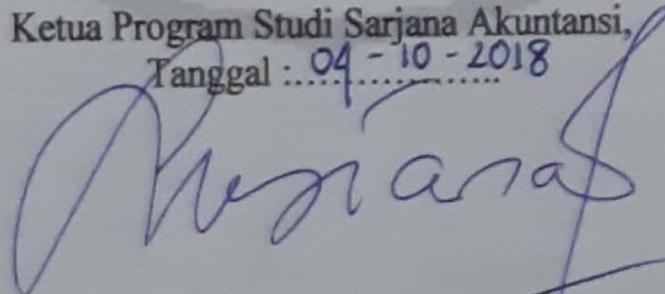
Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 28 Sept 18



(Dr. Gunasti Hudiwinarsih, M.Si, Ak, CA, QIA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal : 04 - 10 - 2018



(Dr. Luciana Spica Almiliana S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE
AUDIT, ROA DAN DER TERHADAP TAX AVOIDANCE
PENDEKATAN OPERATING CASH FLOW
INDUSTRI PERBANKAN DI ASEAN**

Gita Liony Putri

STIE Perbanas Surabaya

Email : gitaliony468@gmail.com

Villa Jasmine 3 C1-17 Suko, Sidoarjo

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of independent commissioner, audit committee, return on assets and debt to equity ratio to tax avoidance approach of operating cash flow banking industry in ASEAN period 2013 up to 2016. This study uses 414 samples of banking companies and that be done outlier resulting in a final sample of 230 samples. This analysis technique used multiple linier regression analysis. The result of the analysis is independent commissioner and audit committee variables influence to tax avoidance. Meanwhile, profitability (ROA) and leverage (DER) variables do not effect to tax avoidance.

Keyword : *Tax Avoidance, Independent commissioners, audit committee, return on asset and debt to equity ratio.*

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu kepada *self assessment system* dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Jika sudut pandang pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sector pajak akan berkurang, dari sudut pandang perusahaan, pajak juga merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan, untuk

itu manajemen perusahaan harus memaksimalkan hal yang menjadi haknya dan meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan baik. Beban pajak yang tinggi mendorong setiap perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Jacob

(2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak.

Penerapan *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Upaya perusahaan untuk meminimalisir pajak dengan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dengan pembentukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat mengawasi kinerja perusahaan. mekanisme *corporate governance* merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap keharusan agar nilai perusahaan dapat meningkat. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak terlepas dari unsur yang terdapat didalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan. Unsur internal yang terdiri dari pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, sistem remunerasi dan komite audit perusahaan. Sedangkan eksternal perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institut penyedia informasi, akuntan publik, institut yang memihak kepentingan publik bukan kepentingan pribadi, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Fenomena yang berkaitan dengan dunia perpajakan dalam penghindaran pajak yang

baru-baru ini terjadi adalah kebijakan *tax amnesty* dimana dilansir dalam Kompas Jakarta, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan pada tahun 2016 mencapai Rp 4.734 triliun. Angka ini meningkat sebesar 8,40% secara tahunan. Regulator menyebutkan bahwa pertumbuhan DPK perbankan pada tahun ini didominasi oleh pertumbuhan tabungan 12,49 % yang disusul giro sebesar 8,29 % dan deposito sebesar 5,85%. Ketua dewan komisiner OJK Muliawan D Hadad mengungkapkan, pertumbuhan DPK perbankan yang cukup tinggi merupakan pengaruh dari program *tax amnesty*.

September 2016 ada 21 bank yang ditunjuk pemerintah sebagai *gateway* program *tax amnesty*. Dengan kondisi tersebut kredit perbankan hingga November 2016 tumbuh sebesar 8,46% menjadi Rp 4.285 triliun. Kredit rupiah mendominasi pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan sebesar 9,41%. Adapun kredit valas tumbuh sebesar 3,35%. Sekedar informasi dalam program *tax amnesty* ini, pemerintah menargetkan bisa memperoleh tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017. Oleh sebab itu, menurut Soeraji (2017) kementerian keuangan telah menjalankan program *tax amnesty* yang diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak perbankan karena pemerintah menganggap banyak masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya didalam bank namun tidak melaporkannya dalam komposisi harta yang dimiliki pada SPT tahunan, sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan segala aset yang dimiliki pada *tax amnesty* sebelum pemerintah melihat aset yang sebenarnya namun

belum melaporkan akan dikenakan denda 100%. Program ini memiliki bidikan khusus pada wajib pajak badan yang diduga memiliki dana yang berlebih pada tabungan atau pada bank, untuk mengikuti program ini tergantung kebijakan dewan komisaris ataupun direktur pada suatu perusahaan yang bersedia melaporkan segala bentuk aset yang dimiliki.

Kondisi tersebut memiliki argumen lain yaitu apakah keleluasaan Ditjen Pajak menelanjangi rekening seluruh WNI di dalam maupun luar negeri maupun WNA di Indonesia justru akan menuai ketakutan dari para nasabah yang enggan menginvestasikan dananya pada bank, hal ini implementasi pertukaran informasi perpajakan otomatis (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran *Base Erosion* dan *Profit Shiftin* (BEPS) paling lambat 2018. Menurut Parwati yang selaku presiden direktur PT. Bank OCBC NISP Tbk perbankan telah mengantisipasi implementasi AEOI dan BEPS sejak tahun lalu, ketika program pengampunan pajak atau *tax amnesty* mulai dilaksanakan, dapat memperkirakan dampaknya terhadap perbankan maupun lembaga keuangan lain tidak terlalu besar. Beberapa bank juga sedang mempertimbangkan perppu nomor 1 tahun 2017 dalam rangka pengimplementasian AEOI, Parwati meyakini dampaknya akan positif untuk Indonesia terutama mampu menarik dana-dana yang masih terparkir diluar negeri. Namun ada beberapa pihak yang menyebutkan jika peraturan tersebut dilaksanakan akan dapat merontokkan saham-saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan ditengarai akibat terbitnya perppu keterbukaan informasi data keuangan. Kabar tersebut tidak terlalu menjadi perhatian oleh menteri koordinator bidang perekonomian.

Berdasarkan data sementara Direktorat Jendral Pajak sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program tersebut dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat Rp 3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp 1.031 triliun, komitmen repatriasi

pajak sebesar Rp 147 triliun dari target Rp 1000 triliun. Program yang telah dimulai sejak juli 2016 lalu ini telah berhasil menampung realisasi uang tebusan mencapai Rp 129 triliun dari total target penerimaan seluruhnya Rp 165 triliun (Saeroji, 2017).

Segala bentuk permasalahan yang terjadi pada perpajakan sudah semestinya mempunyai kooordinasi yang baik antara elemen yang ada dalam industri perbankan salah satunya dari komisaris independen dan komite audit, selain itu peneliti ingin melihat bentuk pengaruh *Return on Asset* dan *Debt to Equity Ratio*.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Agung (2016) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Mangoting (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak.

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Bursa Efek Indonesia (BEI)

mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang jika tidak sesuai maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak, hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Penelitian lain yang tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Agung (2016) adalah penelitian Mangoting (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan dengan menggunakan *product cost system* dan digunakan untuk mengukur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi total hutang berdasarkan total modal perusahaannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistenan pada variabel penelitian, maka peneliti sekarang ingin meneliti lebih lanjut mendukung argumen atau penelitian siapa yang menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu masih menjadi perdebatan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* apakah masih menjadi tindakan yang diperbolehkan untuk segi perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya disetorkan dan dapat mempengaruhi laba, sementara menjadi hal yang tidak diperbolehkan untuk segi fiskus atau pemerintah dikarenakan dapat mengurangi target penerimaan pajak untuk daerah dan

negara. Negara Asean yang digunakan oleh peneliti meliputi Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar .

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen (1976) teori agensi merupakan konsep yang dijelaskan oleh Meckling tahun 1970-an yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals (pemegang saham) adalah pihak yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain yaitu agents (manajer/CEO) untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Manajer (agen) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (principals) hal itu yang sering menimbulkan perbedaan penangkapan informasi antar kedua belah pihak atau yang dikenal dengan asimetri informasi.

Menurut Khoru (2014) perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem* (permasalahan biaya pada *agency theory*) dimana suatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi dan sisi lainnya pemegang saham ingin menekankan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Keterkaitan antara *agency theory* dengan topik penelitian ini adalah ketika para pemangku kepentingan dalam perusahaan misalnya manajer dan pemilik usaha menginginkan usahanya mendapatkan laba yang besar maka perusahaan akan mengupayakan untuk membuat pelaporan keuangannya terlihat positif atau menunjukkan laba yang besar dengan memperkecil hutang atau beban pajaknya. Sementara itu dalam perusahaan yang baik akan melalui

proses tahapan audit, disini peran komite audit baik auditor internal ataupun eksternal mampu mempengaruhi kinerja perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara berlebihan. Oleh sebab itu *good corporate governance* berperan aktif dalam penciptaan penghindaran pajak bagi perusahaan.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diajukan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider tahun 1950-an. Teori ini membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya. Perilaku komunikasi dipengaruhi oleh atribusi seorang terhadap dirinya maupun lawan bicara. pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang yang membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal bagi orang tersebut.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Hotman (2009) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham yang dimiliki oleh non pemegang saham pengendali. Menurut Mohammad (2006:72-436) ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris.

Komite Audit

Menurut komite nasional kebijakan *corporate governance* mengenai komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Menurut Hotman (2008) pada umumnya komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Profitabilitas (*Return On Asset*)

Menurut Van (2005) rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah pengurangan biaya-biaya modal.

Leverage (*Debt to Equity Ratio*)

Menurut Wirna (2014) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Debt to Equity Ratio* merupakan salah satu proksi dari *leverage* dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat untuk meminimalisasi praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arry (2017), Moses (2017) dan Agung (2016).

H₁ : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Ketika *tax avoidance* mengalami peningkatan sementara komite audit menurun dikarenakan kurangnya kemampuan kinerja komite audit perusahaan untuk melakukan identifikasi perilaku manajer ketika melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan dan pengendalian internal

perusahaan mempunyai pengaruh dalam menjalankan manajemen dan strategi perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Hustna (2017) dan Agung (2016).

H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang ada dan setelah pengurangan biaya-biaya modal. Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisien yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka akan semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Anouar (2017) dan Hadi (2014).

H₃ : *Return On Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Wirna (2014) *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*, hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat

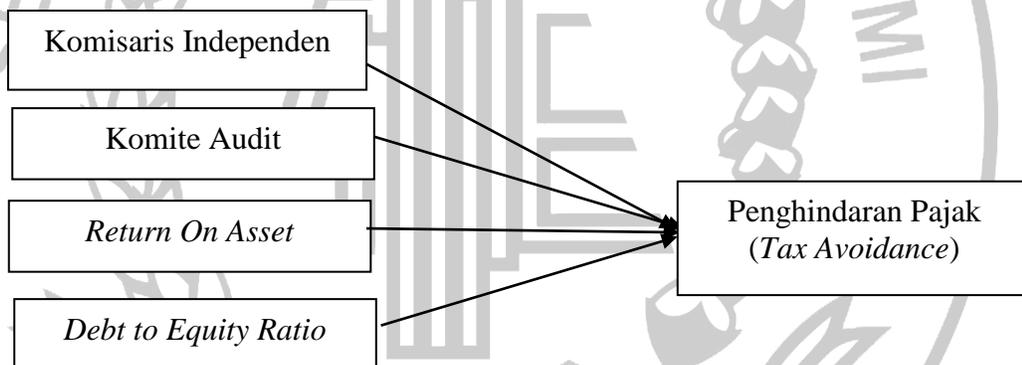
hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya dan apabila hutang digunakan dalam jumlah yang besar dan melebihi modal perusahaan maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Hadi (2014) dan Tiaras (2015).

H₃ : *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

penelitian dan tidak menyimpang terlalu luas. Berikut batasan penelitian terdiri dari :

- a. Perusahaan sampel perbankan yang terdaftar dalam ORBIS dengan web resmi orbis www.orbis.bvdinfo.com
- b. Data yang digunakan yaitu periode 2013-2016 dengan populasi sampel penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan.
- c. Perusahaan yang menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Inggris dalam pelaporan perusahaannya.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan perbankan di Asia Tenggara yang diunduh melalui (www.orbis.bvinfo.com) dan *website* perusahaan.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini digunakan untuk membatasi penelitian agar tetap pada tujuan

- d. Jenis variabel berfokus pada lima variabel independen yaitu komposisi dewan (komisaris independen, komite audit), profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) dengan variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- e. Perusahaan perbankan yang kondisi keuangannya laba atau profit.

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang terdiri dari komisariss independen, komite audit, *return on asset* dan *debt to equity ratio*. Selain itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Menurut Dyreng (2008) banyak penelitian yang menjelaskan pengukuran *tax avoidance* diukur dalam menggunakan model *cash effective tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan. *CETR* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{tax paid}}{\text{Profit before tax}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Proksi komposisi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit berfungsi

memberikan pandangan masalah mengenai yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal. proksi komite audit diukur dengan jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan pada tahun tertentu.

$$KA = \text{Jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan } i \text{ pada tahun } t$$

Return On Asset (Profitabilitas)

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. *Return On Asset* yaitu memiliki konsep ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

$$ROA = \frac{\text{Profit After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Debt to Equity Ratio

Leverage merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki perusahaan. *DER* merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang dengan modal yang dimiliki.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri perbankan di Asia

Tenggara yang dapat diperoleh dari *website* www.orbis.bvdinfo.com pada tahun 2013-2016 sebanyak 167 perusahaan per tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah metode sensus.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menguji adanya hubungan yang berpengaruh antara komisaris independent, komite audit, *return on assets* dan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$TA = \beta_0 + \beta_1 \text{DKI} + \beta_2 \text{KA} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{DER} + e$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance*

DKI = Dewan Komisaris Independen

KA = Komite Audit

ROA = *Return On Asset*

DER = *Debt to Equity Ratio*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar lebih mudah dipahami. Gambaran data tersebut dapat dijelaskan dalam minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Komind	230	0,1	0,8	0,45	0,16
Komiteaud	230	2	9	3,62	0,99
ROA	230	0,0001	0,26	0,02	0,03
DER	230	0,0172	13,92	5,52	3,46
TA	230	0,00016	0,326	0,19	0,07

Sumber : Data diolah

Nilai *mean* menunjukkan sebesar 0,4567 atau sebesar 45,67%, perusahaan

dengan periode 2013 hingga 2016 yang menunjukkan nilai diatas rata-rata sebesar 180 perusahaan dan dibawah nilai rata-rata sebesar 50 perusahaan artinya bahwa perusahaan dengan nilai diatas rata-rata memiliki proporsi komisaris independen yang seimbang dengan perbandingan jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris dalam perusahaan yang akan berdampak pada pelaksanaan *corporate governance* berjalan dengan baik. Rata-rata komisaris independen pada tahun 2013-2016 sebesar 45% dan terjadi puncak peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 49,02% yang artinya bahwa perusahaan memiliki keseimbangan yang cukup baik dengan melibatkan komisaris independen dari jumlah total dewan komisaris. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 42,9% yang artinya bahwa perusahaan tidak melibatkan peran komisaris independen terlalu signifikan.

Keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan sangat mempengaruhi tingkat pengurangan kecurangan yang dilakukan oleh manajer dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, namun tidak hanya jumlah komite audit yang dapat menentukan melainkan tingkat kemampuan komite audit juga sangat mempengaruhi. Nilai rata-rata atau mean sebesar 3,62 atau sebesar 362%. Pada tahun 2013-2016 terjadi penurunan nilai mean mengakibatkan jumlah sampel penelitian perusahaan pada tahun 2013-2016 terdapat 154 perusahaan yang berada dibawah nilai rata-rata, sementara pada tahun 2013-2016 terdapat 76 perusahaan yang berada diatas nilai rata-rata. Sedikitnya jumlah perusahaan yang berada diatas rata-rata menyebabkan perusahaan mengalami jumlah penurunan komite audit. Penurunan terjadi sangat

signifikan pada tahun 2016 sebesar 3,49 atau 349% ketika perusahaan yang mempunyai nilai *mean* dibawah rata-rata sebanyak 36 perusahaan dari 55 perusahaan. Oleh sebab itu grafik diatas menggambarkan selama periode 2013 hingga 2016 perusahaan mengalami penurunan nilai *mean* dikarenakan jumlah proporsi komite audit yang tidak seimbang dalam perusahaan.

Biaya yang dikeluarkan perusahaan dari tiap periode sangat berbeda dan akan berdampak pada perolehan laba yang didapat perusahaan. Berdasarkan nilai *mean* perusahaan dengan kurung waktu 2013 hingga 2016 jumlah perusahaan yang berada diatas rata-rata *mean* keseluruhan berjumlah 72 perusahaan, sementara nilai *mean* ROA yang berada dibawah nilai rata-rata *mean* keseluruhan sebesar 158 perusahaan, artinya bahwa 158 perusahaan yang memiliki komponen total aset dan laba bersih yang cukup besar. Peningkatan terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,1% dan terus terjadi penurunan hingga tahun 2015 sebesar 1,9% dan terjadi peningkatan kembali yang tidak cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 2,9%.

Pendanaan perusahaan berasal dari dua sumber yaitu modal dan hutang perusahaan. hutang yang besar akan menimbulkan bunga yang tinggi sehingga mempengaruhi perolehan laba bersih perusahaan. Penurunan terjadi dari tahun 2013 menuju tahun 2014 sebesar 34,87% dan terjadi peningkatan kembali dari 2014 hingga tahun 2015 sebesar 18,85% sedangkan terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 sebesar 71,47%. Berdasarkan nilai *mean* perusahaan terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 5,524 atau sebesar 552,4% sehingga perusahaan yang memiliki nilai dibawah rata-rata untuk periode 2013-2016 berjumlah 89 perusahaan. Sementara perusahaan yang memiliki nilai diatas rata-rata berjumlah 141 perusahaan dengan tingginya nilai rata-rata DER berarti hutang yang dimiliki perusahaan akan semakin meningkat, artinya 141 perusahaan tersebut mampu menjamin hutang

yang dimiliki dengan komponen modal atau ekuitas perusahaan yang dimiliki.

Keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui perencanaan pajak mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016 sebesar 21,6% dan terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 18,3%. Tahun 2016 terjadi peningkatan nilai CETR artinya bahwa perusahaan pada tahun 2016 memiliki kecenderungan melakukan pembayaran pajak yang sebenarnya, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* lebih rendah. Sementara tahun 2015 terjadi penurunan CETR menunjukkan bahwa selama periode 2015 perusahaan lebih cenderung melakukan penghematan pajak dengan tidak membayarkan pajak yang seharusnya sehingga mengakibatkan penghindaran pajak perusahaan lebih besar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan table *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi secara normal jika hasil uji normalitas memperoleh nilai *sig.* lebih dari sama dengan 0,05 dan hasil uji menunjukkan nilai 0,128 yang artinya bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. *Run test* digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Hasil *run test* menunjukkan bahwa nilai

asym.sig lebih kecil yaitu 0,034 sama dengan 0,05 yang berarti terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

Uji Multikolinieritas

Nilai VIF yang diperkenankan adalah 10, jika nilai $VIF \leq 10$ maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas yaitu terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel-variabel bebas dan angka *tolerance* mempunyai angka $\geq 0,1$ maka variabel tersebut tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas pada Komisaris Independen nilai *tolerance* 0,938 dan nilai VIF 1,067. Komite Audit nilai *tolerance* 0,898 dan nilai VIF 1,114. *Return On Asset* nilai *tolerance* 0,927 dan nilai VIF 1,079. *Debt to Equity Ratio* nilai *tolerance* 0,889 dan nilai VIF 1,125. Sehingga menunjukkan variabel-variabel yang digunakan tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residualnya $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil nilai signifikan dari variabel independen hasil regresi antara absolute residual dengan variabel independen ada yang kurang dari 0,05 yaitu variabel Komisaris Independen (KI) 0,001 dan variabel Komite Audit (KA) 0,015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Model regresi ialah suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar dua variabel atau lebih maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TA = 0,209 - 0,053 \text{ DKI} + 0,008 \text{ KA} - 0,011 \text{ ROA} + 0,0009 \text{ DER} + e$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa :

- Nilai konstanta 0,209 menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata *tax avoidance* adalah sebesar 0,209.
- Koefisien regresi Komisaris Independen (KI) -0,053 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan unit komisaris independen (KI) akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,001. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan negatif antara komisaris independen, semakin besar jumlah komisaris independen yang terlibat dari jumlah dewan komisaris keseluruhan maka semakin kecil nilai *tax avoidance* dalam perusahaan atau kasus *tax avoidance*.
- Koefisien regresi Komite Audit sebesar 0,008 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan unit komite audit (KA) akan meningkatkan nilai CETR sebesar 0,008 dengan asumsi variabel independen selain KA dianggap konstan atau tidak berpengaruh. Koefisien yang bernilai positif menggambarkan jika semakin banyak komite audit perusahaan maka semakin rendah nilai *tax avoidance*.
- Koefisien regresi Profitabilitas (ROA) -0,011 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan unit Profitabilitas (ROA) akan menurunkan *tax avoidance* sebesar -0,011. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan negatif antara profitabilitas, besar atau kecilnya profitabilitas tidak akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

- e. Koefisien regresi *Leverage* (DER) 0,000092 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan unit *leverage* akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,000092. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan negatif antara *Leverage*, besar atau kecilnya *leverage* tidak akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.
- f. “e” menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan *leverage*.

Uji Hipotesis

Uji F

Model dikatakan signifikan atau fit (cocok) jika nilai sig < 0,05. Hasil uji yang menunjukkan tentang kesesuaian model. Pada tabel 4.16 memperlihatkan bahwa nilai sig. Sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F 3,911 itu berarti dapat disimpulkan bahwa model fit atau sesuai sehingga H_0 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ketetapan model regresi dapat diuji dengan menggunakan Adjusted R-Square. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel tersebut menunjukkan nilai Adj R Square bernilai 0,048 maka dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh variabel independen KI, KA, ROA dan DER terhadap *Tax Avoidance* (CETR) sebesar 4,8% berarti ada faktor lain sebesar (100-4,8)% yang tidak masuk dalam model yang dijelaskan oleh eror.

Uji t

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penguji

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi yang lebih besar sama dengan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

1. Pengaruh Komisaris Independen (X_1) Terhadap *Tax Avoidance*
Berdasarkan komisaris independen (KI) yang mempunyai nilai t sebesar -3,504 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama yang dilakukan peneliti diterima.
2. Pengaruh Komite Audit (X_2) Terhadap *Tax Avoidance*
Berdasarkan KA yang mempunyai nilai t sebesar 2,462 dan nilai signifikan sebesar $0,015 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya bahwa variabel KA perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis kedua yang dilakukan peneliti diterima.
3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap *Tax Avoidance*
Berdasarkan ROA yang mempunyai nilai t sebesar -0,476 dan nilai signifikan sebesar 0,635 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis ketiga yang dilakukan peneliti ditolak.
4. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Tax Avoidance*
Berdasarkan DER yang mempunyai nilai t sebesar 0,099 dan nilai signifikan sebesar 0,921 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0

diterima, artinya bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis keempat yang dilakukan peneliti ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Berdasarkan *agency theory* manajer bertindak sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal*. Adanya perbedaan pendapat antara manajer dan pemegang saham menimbulkan dampak adanya informasi yang tidak simetris. Informasi yang tidak simetris ini muncul akibat manajer menginginkan usahanya mendapatkan laba yang tetap besar maka perusahaan akan mengupayakan untuk membuat laporan keuangannya terlihat positif atau menunjukkan laba dengan pembayaran atau beban pajak yang rendah. Perusahaan melakukan permainan manipulasi pada laporan keuangan sehingga menampilkan laba yang besar namun merencanakan untuk melakukan pembayaran pajak yang rendah. Oleh sebab itu peran komisaris independen hanya mengawasi pengendalian internal dalam sebuah perusahaan.

Mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi sehingga komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya bahwa tingkat penghindaran pajak sangat ditentukan dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen. Terbukti bahwa data yang ada menunjukkan jika komisaris independen mengalami penurunan nilai maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat dari periode

2013-2016, sehingga penelitian ini mampu membuktikan teori agensi yang digunakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arry Eksandy (2017), Moses Dicky (2017) dan Agung, Wilopo (2016) namun hasil lain menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Hustna dkk (2017), Putu Rista (2016), dan Irvan Tiaras (2015).

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berfungsi memberikan pandangan masalah mengenai yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal. Berdasarkan teori agensi yang menceritakan adanya hubungan timbal balik yang baik antara *agent* dan *principals*. Komite audit memiliki peran penting dalam mengontrol laporan keuangan perusahaan. Ketika komite audit mengidentifikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, maka komite audit berhak melakukan kajian ulang yang bertanggung jawab akan kecurangan tersebut, komite audit juga tidak luput dari penilaian bagaimana kinerjanya selama periode tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak. Terbukti bahwa data yang ada menunjukkan jika komite audit mengalami penurunan nilai maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat dari periode 2013-2016 atau terjadinya pergerakan grafik yang memiliki hubungan timbal balik, sehingga penelitian ini mampu membuktikan teori agensi yang

digunakan. Oleh sebab itu teori *agency* menjelaskan bahwa *stakeholder* cenderung melakukan perencanaan pajak perusahaan untuk melakukan sebuah penghematan pajak, adanya sebuah penghematan pajak yang berlebih menuntut komite audit memegang peran penting dalam meminimalisir tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Hustna dkk. (2017) dan Wilopo (2016), namun hasil lain menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Eksandy (2017), Dicky (2017) dan Rista (2016).

Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang ada dan setelah pengurangan biaya-biaya modal. ROA mengalami peningkatan maka *tax avoidance* (CETR) semakin rendah, CETR yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan agar dapat melakukan penghematan aliran kas yang dikeluarkan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, apabila ROA atau profit perusahaan menurun maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan, ROA yang kecil pula menunjukkan semakin tingginya usaha untuk tidak meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara perencanaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap upaya perusahaan melakukan *tax avoidance*. Terbukti dengan adanya data atau dengan pergerakan grafik yang menggambarkan tidak adanya hubungan timbal balik antara profitabilitas dengan upaya perusahaan

melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan penghasilan laba yang besar atau dengan laba yang kecil keduanya memiliki persamaan untuk melakukan perencanaan pajak untuk melakukan penghematan aliran kas keluar pada perusahaannya, namun perusahaan dengan laba besar kecenderungan melakukan perencanaan pajak dengan tingkat yang lebih rendah sehingga pajak yang dikeluarkan atau pajak yang dibayarkan tidak terlalu mengganggu aliran kas perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan laba kecil akan melakukan perencanaan pajak yang besar karena mereka akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aliran kas yang dimiliki oleh perusahaan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Anouar (2017) dan Hadi (2014) namun hasil penelitian sebelumnya yang lain menunjukkan bahwa *return on asset* masih berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* adalah Diamonalisa(2016).

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap

Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Debt to Equity Ratio* merupakan salah satu proksi dari *leverage* dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* (DER), berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang-hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban perusahaan. Adanya keterkaitan antara *debt to equity ratio* dengan *agency theory* adalah ketika manajer cenderung

menyukai penggunaan hutang karena merupakan insentif pajak semakin besar hutang yang dimiliki maka semakin besar pula beban bunga yang dihasilkan maka beban pajak yang dihasilkan akan semakin kecil. Kecilnya beban pajak akan mengurangi tingkat pembayaran pajak yang dapat mengindikasikan tingginya penghindaran atau bahkan penghematan pajaknya, sehingga *leverage* bukanlah motivasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Keputusan perusahaan menggunakan hutang, tidak terkait dengan upaya perusahaan untuk memanfaatkan biaya hutang. Penggunaan hutang merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan pemilik perusahaan untuk mendisiplinkan manajer sebagai akibat adanya asimetri informasi. (Pendidik, 2017)

Penelitian ini menjelaskan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh dengan upaya perusahaan melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*, hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya dan apabila hutang digunakan dalam jumlah yang besar dan melebihi modal perusahaan maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu berdasarkan data 2013-2016 yang ada menunjukkan bahwa jika pergerakan DER meningkat maka pergerakan *tax avoidance* yang dijelaskan melalui CETR juga ikut mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dengan uji statistik t atau uji hipotesis menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Junila Hadi (2014) dan Irvan Tiaras (2015), namun hasil lain ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya ada Moses Dicky (2017), Dayday Anouar (2017), Mardiah Diamonalisa (2016) dan Utkir (2012).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) terhadap *tax avoidance* dengan subyek penelitian adalah perusahaan sektor perbankan tahun 2013-2016 yang terdaftar dalam Orbis. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan tingkat batasan dalam penelitian. Sampel akhir yang digunakan peneliti sebanyak 230 sampel perusahaan perbankan selama tahun 2013-2016. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier berganda meliputi uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, uji kelayakan model (uji F dan uji R square) yang terakhir adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama diterima, karena semakin tingginya komisaris independen yang terlibat semakin kuatnya kontrol atau pengawasan yang dilakukan, sehingga menekan terjadinya tindakan *tax avoidance*.
2. Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua diterima, karena semakin tinggi

komite audit maka semakin tinggi juga pengawasan dalam bidang kinerja keuangan perusahaan sehingga meminimalisir manajemen untuk melakukan *tax avoidance*.

3. Profitabilitas (*Return On Asset*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis ketiga ditolak, karena besar kecilnya laba perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.
4. Leverage (*DER*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis keempat ditolak, karena berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang-hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan yang memiliki nilai hutang yang tinggi akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, sebaliknya ketika perusahaan mempunyai hutang yang rendah maka kecenderungan perusahaan akan melakukan penghematan pajak yang tinggi.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan bagi penelitian selanjutnya yaitu :

- a. Uji asumsi klasik yang dilakukan menyatakan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
- b. Selain itu adanya keterbatasan lain yang menunjukkan bahwa web resmi orbis yang digunakan peneliti untuk melihat perusahaan-perusahaan perbankan se-Asean yang sudah mendaftarkan dalam www.orbis.bvdinfo.com sudah tidak dapat login jika tidak mendaftarkan dengan prosedur yang ditetapkan
- c. Adanya annual report yang disusun tidak menggunakan bahasa pengantar

internasional yang menyebabkan peneliti tidak dapat mengerti isi dari annual report tersebut sehingga data dilakukan eliminasi.

- d. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan kurs yang tidak sesuai untuk masing-masing negara sehingga mengharuskan peneliti melakukan perkalian ulang untuk menyamakan kurs US Dollar yang bersumber utama melalui ORBIS. Sehingga jika data dalam ORBIS tidak menyajikan perkalian kurs maka data tersebut akan dieliminasi.
- e. Adanya perbedaan standar regulasi untuk tarif pajak dan kebijakan komisaris independent masing-masing negara sehingga untuk tarif pajak menggunakan standar negara dengan tarif pajak rendah. Sementara untuk keberadaan komisaris independent menggunakan standar negara terendah.
- f. Penelitian saat ini memiliki hipotesis yang tidak menggunakan arah. Penggunaan arah positif atau negatif digunakan untuk memberikan informasi seberapa berpengaruhnya sebuah variabel.

Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya yaitu :

- a. Peneliti dapat menggunakan teknik analisis lain selain teknik analisis regresi linier berganda yang tidak membutuhkan uji asumsi klasik.
- b. Sementara itu berkaitan mengenai ruang lingkup sampel yang digunakan peneliti selanjutnya dapat meneliti sebatas lingkup Indonesia yang tidak memiliki batas akses Bursa Efek Indonesia atau dapat membandingkan antar

dua negara saja dengan jangkauan sumber atau standar informasi yang diberlakukan untuk masing-masing negara.

- c. Sebaiknya penelitian selanjutnya memperhatikan terlebih dahulu bahasa yang digunakan dalam pelaporan perusahaan sehingga tidak membuang data eliminasi terlalu banyak.
- d. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan dengan mata uang sama.
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti hanya perbandingan dua negara dengan regulasi standar yang sama.
- f. Penelitian yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan tambahan arah pada hubungan variabel penelitiannya untuk memberikan informasi tambahan pada tiap hubungan variabel.

DAFTAR RUJUKAN

- Dyreng, S. D., h. Michelle., e. L. Maydew, 2008, *long-run corporate tax avoidance. The accounting riview*. 83 Pages :61-82
- Mohamad Samsul, M. A. (2006). dalam s. Suryadi saat dan yati sumiharti, pasar modal dan manajemen portofolio halaman : 72-436.
- Hotman, T, Pohan (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobing Q, AkruaI Pilihan Tarif Efektif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 4, No.2, halaman 113-135
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. *An Emperical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development*, 5 (18): 22-27.
- Jensen, M. (1976). *Theory of the firm : managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of financial economics* 3, 305-360.
- M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas *Tax Avoidance*. SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram.
- Pendidik, I. A. (2017). Harmonisasi Spirit Kebhinnekaan untuk Penguatan Profesionalitas Akuntan Menuju Indonesia Jaya. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Xx Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*.
- Soeraji, O. (2017, April 7). Retrieved from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id/content/article/setelah-amnesti-pajak-berakhir) : <http://www.pajak.go.id/content/article/setelah-amnesti-pajak-berakhir>
- Van Horne, J. C. (2005) *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Dalam A.d.Aria Fahmita. Jakarta : PT. Salemba Empat Buku Satu.
- Wirna, Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage, Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI).
- Warsini, S. (2014). *Incoming shifting* Sebagai Reaksi terhadap Perusahaan Tarif Pajak: Deteksi Tindakan Manajemen Laba dan Manajemen Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.